

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Exo Dandy Sujatmiko, Yati Nurhayati, Miftah Ulumudin Tsani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin,
NIM19810782

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin,
NIDN0419048402

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin,
NIDN1123059002

Email : exodandy16@gmail.com

ABSTRAK

Berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang karhutla, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Penanganan Karhutla, perlu diterapkan dengan baik dalam penanganan kasus karhutla di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan Penelitian ini adalah bagaimana Peran dan Kewenangan Satgas Karhutla Kabupaten Kapuas dalam penanganan Karhutla di wilayah Kapuas dan Apa saja kendala yang mempengaruhi efektivitas penegak hukum yang dilakukan oleh Satgas Karhutla Kabupaten Kapuas.

Jenis Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Jenis dan sumber data dari data primer yaitu Satgas Karhutla Kabupaten Kapuas dan data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Populasi penelitian yaitu satgas Karhutla Kab Kapuas dengan sampel penelitian anggota satgas Karhutla Kab Kapuas. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dengan metode kualitatif dengan disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian yaitu peran Satgas Karhutla adalah menjadi koordinator dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Adapun beberapa kendala yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas Karhutla diantaranya kondisi geografis, keterbatasan peralatan, sarana dan prasarana, terbatasnya akses jalan dan jaringan, Tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla dan peran aktif masyarakat.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, penegakan hukum, kebakaran hutan dan lahan, kapuas

ABSTRACT

Exo Dandy Sujatmiko. 19.81.0782. 2023. legal review in forest and land fire cases in Kapuas Regency, Central Kalimantan Province. Thesis, Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Supervisor I Dr Yati Nurhayati, SH., MH, Supervisor II Miftah Ulumudin Tsani, S.H., MH.

Keywords: Legal Review, law enforcement, forest and land fires, Kapuas

Various regulations and laws governing forest and land fires, such as Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law no. 18 of 2013 concerning Prevention and Management of Forest and Land Fires, as well as Government Regulation no. 71 of 2014 concerning Handling Forest and Land Fires, needs to be implemented properly in handling forest and land fires cases in Kapuas Regency, Central Kalimantan Province.

The aim of this research is what the role and authority of the Kapuas Regency Karhutla Task Force is in handling forest and land fires in the Kapuas area and what are the obstacles that influence the effectiveness of law enforcement carried out by the Kapuas Regency Karhutla Task Force.

The type of research carried out is empirical research, with a descriptive research approach. Research location in Kapuas Regency, Central Kalimantan Province. Type and source of data from primary data, namely the Kapuas Regency Karhutla Task Force and secondary data from primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials. The research population is the Kapuas Regency Karhutla task force with a research sample of members of the Kapuas Regency Karhutla task force. Data collection techniques using observation, interviews and literature study. Data analysis using qualitative methods presented descriptively.

The results of the research are that the role of the Karhutla Task Force is to be a coordinator and coordinate with various related parties in various efforts to prevent and control as well as extinguish forest and land fires. There are several obstacles that influence the effectiveness of law enforcement in implementing forest and land fires tasks, including geographical conditions, limited equipment, facilities and infrastructure, limited access to roads and networks, the level of public awareness about the dangers of forest and land fires and the active role of the community.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Otong Rosadi (2011), *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm 78

Hatta, M, (2008), *Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sifat-sifat Tanah di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat*. Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara.

Jurnal

Darwiati, W., F.D. Tuheteru. (2010), *Dampak kebakaran hutan terhadap pertumbuhan vegetasi* Jurnal Mitra Hutan Tanaman Vol 3(1), Bogor: Hal 2

Nugroho, S.P. (2000) *Minimalisasi konsentrasi penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan metode modifikasi cuaca* Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca Vol 1(1). Hal 1

Notohadinegoro, T. (2006). *Pembakaran dan Kebakaran Lahan*. Jurnal. Ilmu Tanah Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Hal 1

Perwitasari, D., & Sukana, B. (2012). *Gambaran Kebakaran Hutan Dengan Kejadian Penyakit Ispa Dan Pneumonia Di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi Tahun 2008*. Jurnal Ekologi Kesehatan, 11(2 Jun), Jambi 147–157.

Saharjo, B. H dan C. Gago, (2011). Suksesi Alami Paska Kebakaran pada Hutan Sekunder di Desa Fatuquero, Jurnal Silviculture Tropika Kecamatan Railaco, Kabupaten Ermera-Timor Leste. Silviculture Tropika, 2(1), pp.40–45